



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2025

DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BOGOR



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3.1. Tugas Pokok .....	3
1.3.2. Fungsi .....	3
1.4. Struktur dan Organisasi.....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 .....	6
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>10</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	10
3.2. Analisis Kinerja.....	12
3.3. Realisasi Anggaran .....	19
3.4. Realisasi Program .....	21
3.5. Realisasi Kegiatan .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>46</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2025-2029 .....	8
Tabel 2.2. Target Capaian Kinerja tahun 2025 .....	9
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2025 .	10
Tabel 3.2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024 .....	14
Tabel 3.2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025 .....	14
Tabel 3.2.3. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 .....	17
Tabel 3.2.4. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 .....	17
Tabel 3.2.5. Capaian Program Tahun 2025 .....	20
Tabel 3.2.6. Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2026 .....	21
Tabel 3.3.1. Realisasi Anggaran .....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Kerangka Pengukuran Kinerja .....	2
Gambar 1.4.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bogor.	5

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja Dinas Sosial pada tahun – tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Bogor merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial serta tugas pembantuan.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagaimana diantaranya :

1. Perumusan kebijakan bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, penyusunan dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Sosial terdapat 2 sasaran dan terdapat 3 indikator untuk menilai realisasi dan capaian ditahun 2025.

Secara keseluruhan sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2025 Dinas Sosial telah tercapai. Keberhasilan pencapaian berbagai penyusunan kinerja di Dinas Sosial merupakan hasilkerja sama segenap jajaran Dinas Sosial, serta bimbingan dari Pimpinan dan dukungan dari lintas PD. Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

# **BAB I**

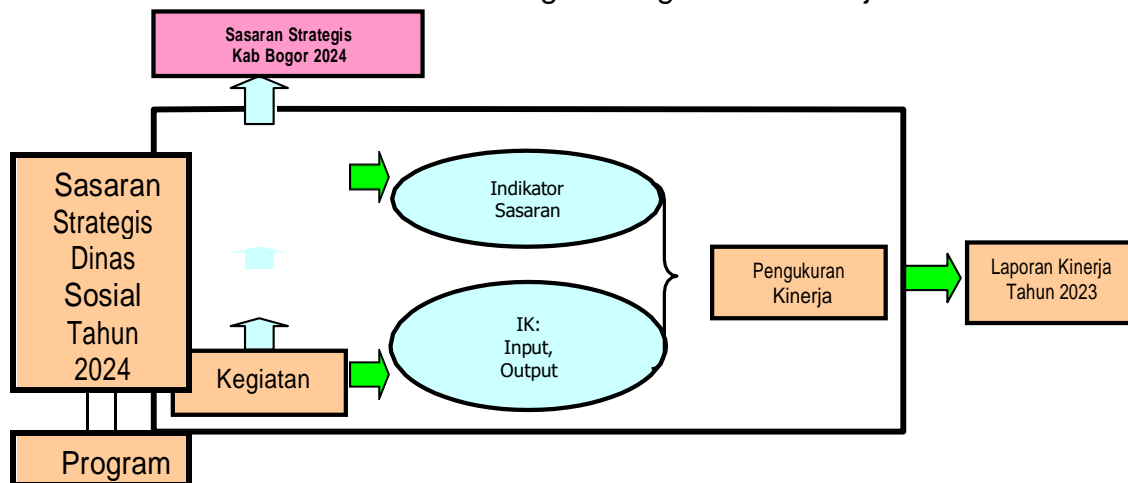
## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 kepada Bupati Bogor, Dinas Sosial menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2025. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan program / kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2025. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Sosial tahun 2025 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025, disajikan dalam diagram 1.1.

Gambar 1.1.  
Alur Kerangka Pengukuran Kinerja



Metode penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bogor adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1.3.1. Tugas Pokok**

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial serta tugas pembantuan.

#### **1.3.2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan dan jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial;
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

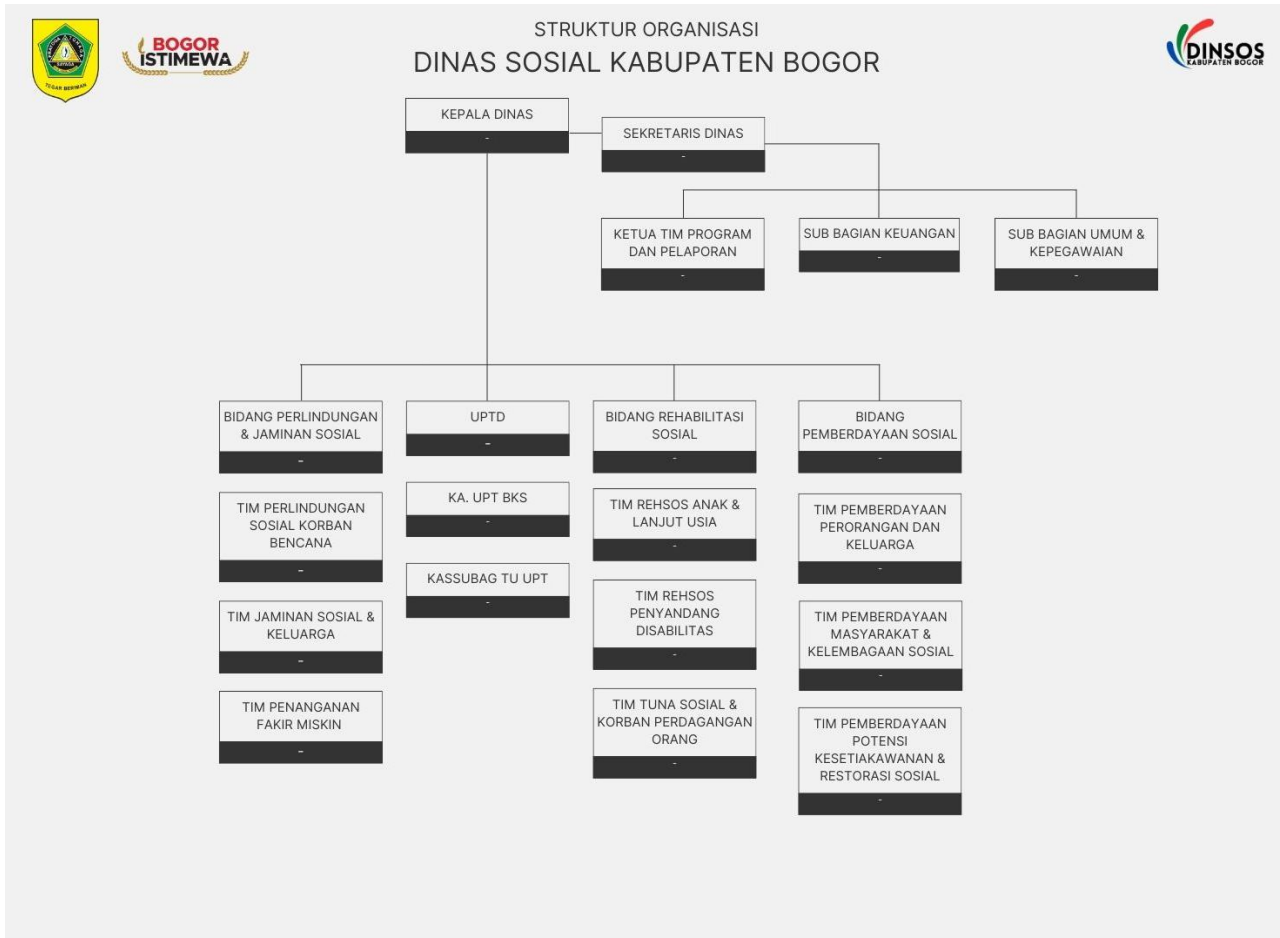
### **1.4. Struktur dan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat ;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Ketua Tim Program dan Pelaporan.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
  - a. Ketua Tim Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  - b. Ketua Tim Jaminan Sosial Keluarga; dan
  - c. Ketua Tim Penanganan Fakir Miskin.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial ;
  - a. Ketua Tim Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia;
  - b. Ketua Tim Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan

- c. Ketua Tim Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang.
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial ;
  - a. Ketua Tim Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
  - b. Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
  - c. Ketua Tim Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan & Restorasi Sosial.
- 6. UPT Balai Kesejahteraan Sosial
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.4.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial**  
**Kabupaten Bogor**  
**(Sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2022)**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025.

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029**

Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Dinas Sosial menyusun Renstra, yang memuat Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

##### **Visi : Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang**

Misi 1.	Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
Misi 2.	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
Misi 3.	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
Misi 4.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
Misi 5.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan kelima misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Bogor melaksanakan misi ke lima yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran menurunnya kemiskinan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja kunci beserta targetnya yang dijabarkan per tahun.

## 1. Tujuan dan Sasaran Strategis

### a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

### b. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

**Sasaran-sasaran** Dinas Sosial Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

**Tabel 2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029**

Sasaran Strategis	Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Cakupan pelayanan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi	21,94	23,18	24,42	25,67	26,91	28,16
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya	41,72	42,22	42,72	43,22	43,72	44,22
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan	Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha	1,72	7,40	11,10	14,80	18,50	22,20

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial dan Bupati Bogor. Tapkin Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Tapkin Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun sesuai DPA Dinas Sosial Kabupaten Bogor 2025 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Dinas Sosial Kabupaten Bogor 2025 perubahan. Tapkin Dinas Sosial memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator *outcome* berikut target kerjanya, indikator *output* berikut target

kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2025.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2025, dana yang digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2025, tercantum dalam belanja langsung setelah perubahan (belanja program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 49.562.121.160,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

**Tabel. 2.2**  
**Target Capaian Kinerja tahun 2025**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Cakupan pelayanan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi	21,72%
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya	41,72%
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan	Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha	1,72%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2025, diukur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial.

Capaian kinerja Dinas Sosial terhadap realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2025**

Indikator Tujuan	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	21,72%	21,43%	98,66%
<b>Indikator Sasaran</b>			
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	41,72%	39,17%	93,88%
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan	1,72%	3,70%	215,11%

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Anggaran pada sasaran ini sebesar Rp. 49.562.121.160,- terealisasi sebesar Rp. 46.770.690.375,-. Sasaran ini dicapai dengan 7 (tujuh) Program sebagai berikut:

No	Program	Target Anggaran	Realisasi	%	Capaian Fisik
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	8.556.817.276	8.500.212.179	99.34	100%
2	PROGRAM PENANGANANWARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.480.000	1.480.000	100	100%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.503.300.025	11.201.692.981	97.38	100%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.393.028.550	2.348.142.186	98,12	100%
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.535.452.975	3.470.018.909	98.15	100%
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.467.690.947	1.339.568.409	91,27	100%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.104.351.387	19.909.575.711	90,07	100%
<b>Rata-rata</b>		<b>49.562.121.160</b>	<b>46.770.690.375</b>	<b>94.37</b>	<b>100%</b>

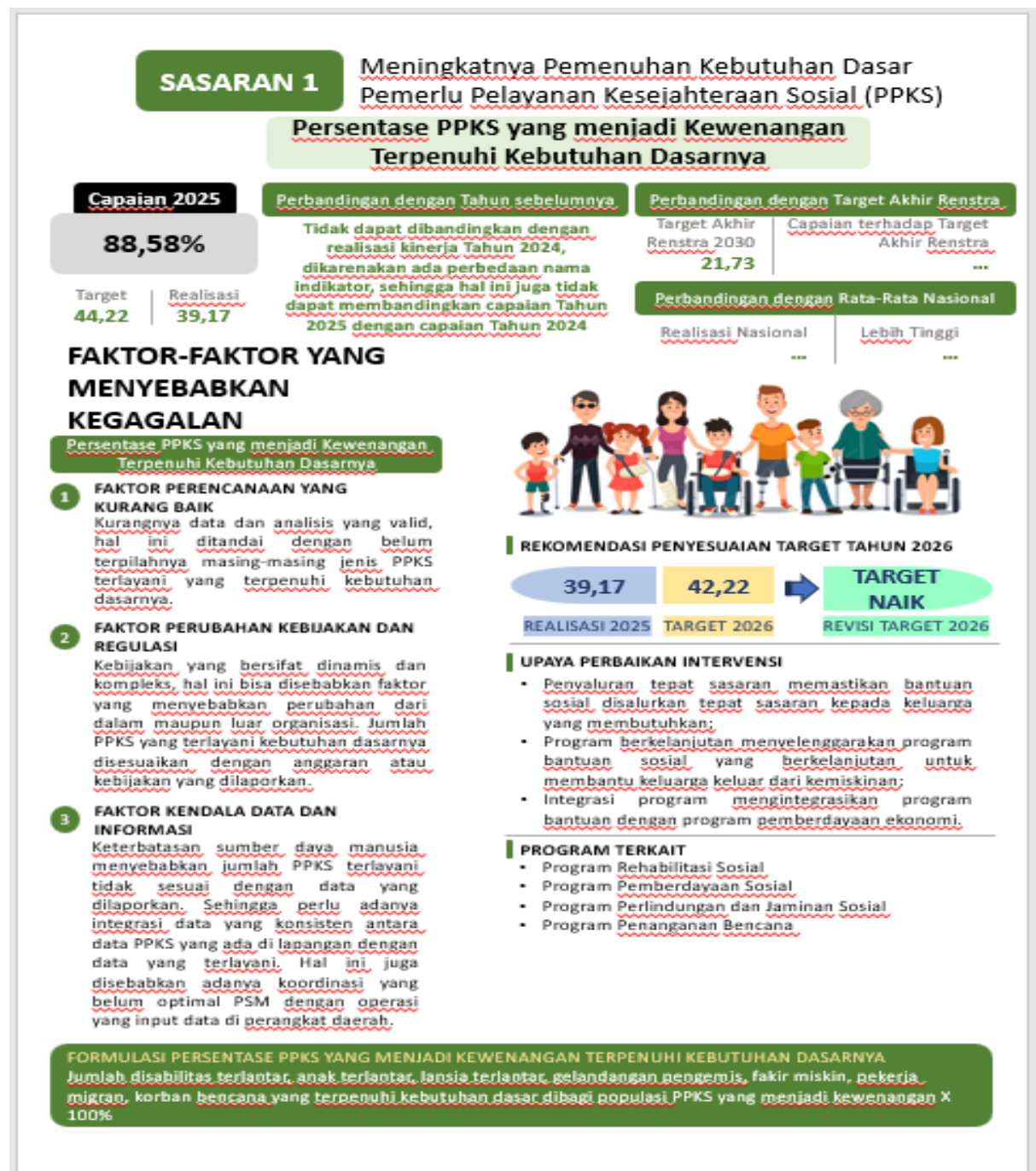
Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja pada sasaran ini adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial terutama dukungan dari 3 (Tiga) Bidang yakni Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial dengan tingkat capaian kinerja 98.68% namun demikian untuk tahun 2025 sasaran ini tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance clean government*.

### 3.2. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian kinerja sasaran beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).



Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang meningkatkan kesejahteraan PPKS. Hal ini ditandai dengan Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya hampir mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 88,58% dari target sebesar 44,22% dan terealisasi sebesar 39,17%. Realisasi sebesar 39,17% artinya jumlah PPKS terlayani yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 9.861 orang dari jumlah seluruh PPKS sebanyak 25.176 orang.

Dilihat dari aspek realisasi, Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya Dilihat dari perspektif Dokumen Perencanaan Strategis, capaian Dinas Sosial Kabupaten Bogor dibawah target akhir renstra yaitu sebesar 21.73% sedangkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 21.43%.

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan indikator tujuan Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dibawah target renstra antara lain:

a. Perencanaan yang kurang baik

- Kurangnya data dan analisis yang valid hal ini ditandai dengan belum terpilahnya masing-masing jenis PPKS terlayani yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

b. Perubahan Kebijakan dan Regulasi

- Kebijakan yang bersifat dinamis dan kompleks

Hal ini bisa disebabkan faktor yang menyebabkan perubahan dari dalam maupun luar organisasi. Jumlah PPKS yang terlayani kebutuhan dasarnya disesuaikan dengan anggaran atau kejadian yang dilaporkan.

c. Kendala Data dan Informasi

- keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan jumlah PPKS terlayani tidak sesuai dengan data yang dilaporkan. Sehingga perlu adanya integrasi data yang konsisten anatara data PPKS yang ada di lapangan dengan data yang terlayani. Hal ini juga disebabkan adanya koordinasi yang belum optimal PSM dengan operator yang input data di perangkat daerah.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dikarenakan ada perbedaan nama indikator, sehingga hal ini juga tidak dapat membandingkan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun 2024.

**Tabel 3.2.1.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024**

NO.	Renstra Perubahan Tahun 2024-2026	Indikator	Satuan	Target	Rumus
1.	Tujuan Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	100	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani/Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam satu tahun anggaran x 100%
2.	Sasaran Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan SLRT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88	

**Tabel 3.2.2.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025**

NO.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rumus
1.	Tujuan Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Cakupan pelayanan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi	%	21,72	Rata-Rata Capaian PPKS yang mendapat bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi
2.	Sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	41,72	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, pengemis gelandangan, fakir miskin, pekerja migran, korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar dibagi populasi PPKS yang menjadi kewenangan X 100%
3.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin ekstrem	Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi	%	1,72	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah mendapat bantuan usaha dibagi jumlah sasaran graduasi kemiskinan X 100%

## Upaya Perbaikan dan Intervensi

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan agar terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS terpenuhi yaitu Optimalisasi Program Bantuan Sosial dengan meningkatkan program perlindungan dan jaminan sosial antara lain:

- a. Penyaluran Tepat Sasaran Memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan.
- b. Program Berkelanjutan Menyelenggarakan program bantuan sosial yang berkelanjutan untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan.
- c. Integrasi Program Mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi.

Program yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

Efisiensi anggaran atas Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya tidak ada. Hal ini disebabkan karena indikator ini tidak mencapai target.

## Sasaran 1

Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sasaran Graduasi Kemiskinan

### SASARAN 2

Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sasaran Graduasi Kemiskinan

Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha

#### Capaian 2025

214,73%

Target 1,72 | Realisasi 3,7

#### Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perbedaan nama sasaran Tahun 2024 dengan sasaran Tahun 2025

#### Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

Target Akhir Renstra 2030 ....  
Capaian terhadap Target Akhir Renstra ....

#### Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional

Realisasi Nasional ....  
Lebih Tinggi ....

### FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha

#### 1 FAKTOR OPTIMALISASI PENDATAAN DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA MANFAAT

1. Ketepatan Sasaran (Targeting)
2. Pendampingan dan Edukasi (Capacity Building)
3. Jaringan Sosial dan Lingkungan
4. Sinergi antar Program (Graduasi)

#### 2 FAKTOR ANGGARAN YANG MEMADAI

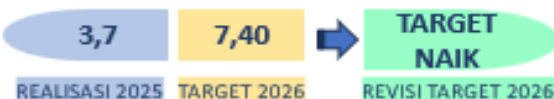
Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

#### 3 FAKTOR KEBIJAKAN PIMPINAN YANG KONSISTEN DALAM MENANGANI KEMISKINAN

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan berfokus pada transisi dari penerima bantuan sosial (bansos) pasif menjadi pelaku ekonomi mandiri (graduasi mandiri).



#### REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026



#### UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI

- Penyaluran bantuan yang tepat sasaran
- Program berkelanjutan menyelenggarakan program bantuan sosial yang berkelanjutan untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan;

#### PROGRAM TERKAIT

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pemberdayaan Sosial

FORMULASI PERSENTASE JUMLAH SASARAN KELUARGA GRADUASI MISKIN YANG DAPAT MELAKUKAN USAHA  
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah mendapat bantuan usaha dibagi jumlah sasaran graduasi kemiskinan X 100%

Bantuan Sosial dikelola dengan cerdas, Pelatihan Keahlian dengan peningkatan SDM dan Modal Usaha dapat mempengaruhi meningkatnya persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha. Capaian Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 214,73% dengan target sebesar 1.72% dan terealisasi 3,7%. Realisasi sebesar 3,7% artinya ada 111 keluarga graduasi miskin yang mendapatkan bantuan usaha berupa gerobak dari jumlah total 3.000 keluarga miskin yang ada di Kabupaten Bogor. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga graduasi miskin berjalan sangat baik dan melampaui ekspektasi yang telah direncanakan.

Jika dilihat dari tahun sebelumnya sasaran Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perbedaan nama sasaran tahun 2024 dengan sasaran tahun 2025.

Tabel 3.2.3.  
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			2024	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan SLRT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	88 Point	87.19 Point

Tabel 3.2.4.  
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			2025	2025
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan	Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha	%	1,72	3,70

Faktor-faktor Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan

1. Optimalisasi pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat

Penyaluran bantuan gerobak usaha yang tepat sasaran merupakan salah satu strategi krusial dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) untuk mencapai graduasi kemiskinan (mandiri secara ekonomi). peningkatan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan

ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

### **Faktor Ketepatan Sasaran (Targeting)**

- **Verifikasi Berbasis Potensi:** Penerima bantuan dipilih bukan hanya karena miskin, tetapi memiliki motivasi tinggi dan keterampilan dasar untuk berdagang.
- **Kesesuaian Jenis Usaha:** Gerobak diberikan sesuai dengan jenis usaha yang ingin ditekuni KPM (misal: gerobak gorengan, mie ayam, atau minuman dingin), bukan tipe seragam yang tidak sesuai kebutuhan lokasi.
- **Data KPM Update:** Menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid, seringkali diperbarui melalui pendamping PKH atau lembaga zakat (BAZNAS) untuk memastikan penerima benar-benar layak.

### **Faktor Pendampingan dan Edukasi (Capacity Building)**

- **Pendampingan Intensif:** Bantuan gerobak tidak dilepas begitu saja. Pendamping sosial/desa memberikan pelatihan manajemen usaha, pembukuan sederhana, dan cara pemasaran.
- **Pemberdayaan Mental (*Mindset*):** Membangun mental wirausaha agar KPM siap mandiri, berhenti bergantung pada bantuan sosial (graduasi mandiri), dan tidak menjual gerobak bantuannya.
- **Pelatihan Higienitas & Produk:** Edukasi agar produk yang dijual layak konsumsi dan berdaya saing (halal, higienis, kemasan baik).

### **Faktor Sarana dan Manajemen Usaha**

- **Kualitas Gerobak:** Gerobak yang diberikan tahan lama, higienis, dan menarik (layak usaha).
- **Modal Usaha Pendamping:** Seringkali, bantuan gerobak disinergikan dengan modal usaha uang tunai (contoh: bantuan Rp5 juta dari Kemensos pada 2026) untuk membeli bahan baku awal.
- **Pemanfaatan Teknologi (Digitalisasi):** Pendampingan penggunaan QRIS atau pemasaran via media sosial untuk memperluas jangkauan pembeli.

### **Faktor Jaringan Sosial dan Lingkungan**

- **Dukungan Keluarga:** Motivasi dari suami/istri/anak sangat memengaruhi ketahanan KPM dalam menjalankan usaha.
- **Jaringan Pemasaran:** Memanfaatkan lokasi strategis (misal: dekat sekolah atau di depan rumah) dan dukungan komunitas sekitar.

### **Faktor Sinergi Antar-Program (Graduasi)**

- **Integrasi Bansos:** Penyaluran gerobak sering dipadukan dengan program bansos lain (PKH, BPNT) sebelum KPM akhirnya diberdayakan untuk mandiri.
  - **Koneksi ke Perbankan (UMKM):** Membantu KPM terhubung dengan akses perbankan (KUR/BRI/Bank Syariah) untuk pengembangan modal lebih lanjut setelah gerobak aktif.
2. Anggaran yang memadai.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,01%. Penyaluran bantuan Gerobak UEP telah dilaksanakan kepada keluarga miskin sesuai dengan kriteria dan sasaran yang ditetapkan. Bantuan yang diberikan dimanfaatkan sebagai sarana usaha untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif keluarga miskin sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Pelaksanaan Sub Kegiatan terkait pembagian gerobak kepada dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,35%.

3. Kebijakan pimpinan yang konsisten dalam menangani kemiskinan.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan berfokus pada transisi dari penerima bantuan sosial (bansos) pasif menjadi pelaku ekonomi mandiri (graduasi mandiri). Pendekatan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen dengan memutus ketergantungan pada bansos seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya mengubah paradigma dari sekadar memberi bantuan konsumtif menjadi intervensi pemberdayaan produktif agar keluarga miskin benar-benar lepas dari garis kemiskinan.

Program yang mendukung Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan.

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial

Rata-rata capaian kinerja program tahun 2025 dikategorikan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan nilai realisasi kinerja masing-masing program. Adapun capaian program tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 3.2.5.  
Capaian Program Tahun 2025**

NO.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan pendampingan atau fasilitasi PSKS	100	100	100
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	100	100	100
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persentase Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Pengemis/Gelandangan di luar panti yang terehabilitasi sosial	29,05	99,91	343,98
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	73,67	100,00	135,74
5.	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana	100,00	99,89	99,89
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terkelolaanya taman makam pahlawan yang baik	Tingkat pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan pelayanan kesekretariatan	Nilai AKIP PD	100	100	100

2. Rata-rata capaian anggaran program tahun 2025 dikategorikan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan nilai realisasi anggaran masing-masing program. Adapun capaian program tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 3.2.6.**  
**Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025**

No.	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian
1.	Program Pemberdayaan Sosial	8.556.817.276	8.500.212.179	56.605.097	99,34
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.480.000	1.480.000	-	100,00
3.	Program Rehabilitasi Sosial	11.503.300.025	11.201.692.981	301.607.044	97,38
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.393.028.550	2.348.142.186	44.886.364	98,12
5.	Program Penanganan Bencana	3.535.452.975	3.470.018.909	65.434.066	98,15
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.467.690.947	1.339.568.409	128.122.538	91,27
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.104.351.387	19.909.575.711	2.194.775.676	90,07

3. Faktor lainnya yang mendukung indikator Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) meliputi berbagai program bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat.

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 5.63% atau setara Rp 2.791.430.785. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 49.562.121.160 dan terealisasi sebesar Rp. 46.770.690.375,00.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi indikator Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yaitu: Optimalisasi Program Bantuan Sosial dengan meningkatkan program perlindungan dan jaminan sosial antara lain:

- a. Penyaluran Tepat Sasaran Memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan.
- b. Program Berkelanjutan Menyelenggarakan program bantuan sosial yang berkelanjutan untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan.
- c. Integrasi Program Mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025.

Faktor Penghambat:

- a. Alokasi anggaran belum sebanding kebutuhan penanganan masalah sosial
- b. Peralihan dari DTKS ke DTSEN belum sepenuhnya akurat dan mutakhir, perlu adanya proses pepadanan data
- c. Dinamika regulasi kebijakan nasional yang cepat.

Faktor Pendorong

- a. Tercapainya realisasi 215.15% pada sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha disebabkan oleh kebijakan serta anggaran yang mendorong program untuk mempercepat penyelesaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Evaluasi berkala membandingkan target tahunan (Renja) dengan proyeksi Renstra
- c. Adanya kolaborasi antara internal dan eksternal untuk melakukan pepadanan data dan verifikasi data.

### 3.3. Realisasi Anggaran.

Pada Tahun 2025 anggaran belanja langsung Dinas Sosial ditargetkan sebesar Rp. 49.562.121.160,- terealisasi sebesar Rp. 46.770.690.375,- atau terserap 94.37% Hal ini dikarenakan dari semua program yang di Dinas Sosial adanya efisiensi anggaran, selain itu adanya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang paket-paket pekerjaan belum dapat dibayarkan di akhir tahun 2025.

Rincian realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

**Tabel. 3.3.1.  
Realisasi Anggaran**

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	8.556.817.276	<b>8.500.212.179</b>	<b>99.34</b>
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.716.000	16.800.000	73.96
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	8.534.101.276	8.483.412.179	99.41

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>100</b>
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	1.480.000	1.480.000	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>11.503.300.025</b>	<b>11.201.692.981</b>	<b>97.38</b>
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	10.731.532.550	10.438.144.641	97.27
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	771.767.475	763.548.340	98.94
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>2.393.028.550</b>	<b>2.348.142.186</b>	<b>98.12</b>
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	64.100.000	55.725.000	86.93
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.328.928.550	2.292.417.186	98.43
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>3.535.452.975</b>	<b>3.470.018.909</b>	<b>97.06</b>
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2.687.362.875	2.635.720.130	98.08
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	848.090.100	834.298.779	98.37
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>1.467.690.947</b>	<b>1.339.568.409</b>	<b>91.27</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.467.690.947	1.339.568.409	91.27
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>22.104.351.387</b>	<b>19.909.575.711</b>	<b>90.07</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	821.785.580	817.940.096	99,53
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.868.176.737	8.818.883.849	99.44
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.111.564.875	2.983.833.134	95.89
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.072.561.500	221.171.005	20.62
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.349.440.695	5.195.471.560	97.12

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BKS)	1.434.640.875		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.880.822.000	1.872.276.067	64.99

### 3.4. Realisasi Program

Pencapaian Indikator Kinerja Utama di atas merupakan hasil kontribusi dari Pelaksanaan 7 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan 3 Bidang, keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh **Rata-rata Tingkat Capaian Program (Outcome)** sebesar 100% dengan predikat kerja **Sangat Tinggi**. Capaian Program Dinas Sosial dijabarkan secara rinci penjelasan keterangannya adalah sebagai berikut:

- 3.1. Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 2 Kegiatan 6 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial pada Tim Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial dan Tim Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, dengan tingkatcapaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 99.34%.
- 3.2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terdiri dari 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial pada Tim Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan  
Orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%.
- 3.3. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 Kegiatan, 22 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial pada Tim Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Tim Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Tim Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 97.38%.
- 3.4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Tim Jaminan Sosial Keluarga dan Tim Penanganan

Fakir Miskin, tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98.12%.

- 3.5. Program Penanganan Bencana terdiri dari 2 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Tim Bantuan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana dengan tingkat capaian kinerja sebesar sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98.15%.
- 3.6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari 1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial pada Tim Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan tingkat capaian anggaran sebesar 91.27%.
- 3.7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 6 Kegiatan, 35 Sub Kegiatan. Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai penunjang kegiatan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 90.07%.

### **3.5. Realisasi Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 100%, termasuk dalam kategori predikat "Sangat Tinggi, adapun Realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 49.562.121.160.-, dengan Tingkat Capaian sebesar 94.37%, dari total rencana anggaran sebesar Rp 46.770.690.375.- termasuk dalam kategori predikat "Sangat Tinggi". Capaian Kegiatan Dnas Sosial dijabarkan secara rinci dalam laporan ini. Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial, terdiri dari 2 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
  - 1.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 22.716.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.800.000,- atau 73,96 %, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

sebanyak 1 Kegiatan, terealisasi sebanyak 100%.

1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang, dari rencana anggaran sebesar Rp. 22.716.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.800.000,- atau 73,96%, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkorinisasi Peneribatan Ijin Undian Gratis Berhadiah sebanyak 1 dokumen, terealisasi jumlah sebanyak 1 dokumen atau 100%

1.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp 8.534.101.276,- terealisasi sebesar Rp. 8.483.412.179,- atau 99,41%, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebanyak 5 Kegiatan, terealisasi sebanyak 5 Kegiatan atau 100%; dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1.1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 300.000.000,- atau 100,00%, dengan output kegiatan dari Jumlah Orang yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Kewirausahaan bagi Pekerja Sosial Masyarakat dan Kewenangan Kab/kota sebanyak 200 orang, terealisasi jumlah 200 orang atau 100%.

1.1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 534.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 529.300.000,- atau 99,01%, dengan output kegiatan dari Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 40 orang, terealisasi jumlah 40 orang atau 100%.

- 1.1.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.932.928.475,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.900.953.614,- atau 98,35%, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 120 orang, terealisasi jumlah 120 orang atau 100%.
  - 1.1.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.756.672.801,- terealisasi sebesar Rp. 5.743.258.565,- atau 99,77%, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah Potensi Sumber Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 150 Lembaga, terealisasi jumlah 150 lembaga atau 100 %.
  - 1.1.5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.900.000,- atau 100%, dengan output kegiatan dari Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 sertifikat, terealisasi jumlah 1sertifikat atau 100 %.
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, terdiri dari 1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
    - 2.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal **(Kegiatan)** Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal **(Sub Kegiatan)**, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.480.000,- atau 100%, dengan output dari

rencana Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 10 orang, terealisasi sebanyak 10 orang atau 100 %.

3. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 kegiatan 22 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.731.532.550.- terealisasi sebesar Rp. 10.438.144.641.- atau 97.27%, dengan output dari rencana Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) sebanyak 10.087 Orang terealisasi 10.087 Orang atau 100%, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

3.1.1. Penyediaan Permakanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.989.782.500,- terealisasi sebesar Rp. 6.878.344.500,- atau 98.41%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 4.100 Orang, terealisasi sebanyak 4.100 Orang atau 100%.

3.1.2. Penyediaan Sandang, dari rencana anggaran sebesar Rp. 494.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 457.205.000,- atau 92.39%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan sebanyak 1.000 orang, terealisasi 1.000 orang atau 100%.

3.1.3. Penyediaan Alat Bantu, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.175.931.800,- terealisasi sebesar Rp. 2.053.200.070,- atau 94.36%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai

kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 546 orang, terealisasi 546 orang atau 100%.

- 3.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, dari rencana anggaran sebesar Rp. 36.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.305.000,- atau 99.52%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 52 orang, terealisasi 52 orang atau 100%.
- 3.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.480.000,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang, terealisasi sebanyak 5 orang atau 100%.
- 3.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 147.764.600,- terealisasi sebesar Rp. 138.142.680,- atau 93.49 %, dengan output dari rencana Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 180 orang terealisasi sebanyak 180 atau 100%.
- 3.1.7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kesehatan Dasar, dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.940.000,- atau 99.45%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 40 Orang, teralisasi sebanyak 40 Orang atau 100%.

- 3.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, dari rencana anggaran Rp. 10.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.985.000,- atau 99.00%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 41 Orang, teralisasi sebanyak 41 Orang atau 100%
- 3.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 497400000,- terealisasi sebesar Rp. 496.800.000,- atau 99.88%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 4036 Orang, terealisasi 4036 Orang atau 100%.
- 3.1.10. Pemberian Layanan Kedaruratan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 322.443.650,- terealisasi sebesar Rp. 312.352.391,- atau 96.87%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 40 orang, terealisasi sebanyak 40 orang atau 100%
- 3.1.11. Pemberian Layanan Rujukan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 45.320.000,- teralisasi sebesar Rp. 44.390.000,- atau 97.95%, dengan output dari rencana Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 47 orang, terealisasi sebanyak 47 orang atau 100%.
- 3.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dari rencana anggaran sebesar Rp. 771.767.475,- terealisasi sebesar Rp. 763.548.340.- atau 98.94%, dengan output dari rencana Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial sebanyak 310 orang, terealisasi

310 orang atau 100 %, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 3.2.1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.480.000,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 50 Orang, terealisasi 50 Orang atau 100%.
- 3.2.2. Pemberian Layanan Kedaruratan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 476.746.500,- terealisasi sebesar Rp. 472.807.500,- atau 99.17%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 100 Orang, terealisasi 100 Orang atau 100%.
- 3.2.3. Penyediaan Permakanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 85.158.725,- terealisasi sebesar Rp. 83.149.550,- atau 97.64%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 40 orang, terealisasi 40 orang atau 100%.
- 3.2.4. Penyediaan Sandang, dari rencana anggaran Rp. 27.512.200,- terealisasi sebesar Rp. 26.435.900,- atau 96.09%, dengan output dari rencana Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 40 orang, terealisasi 40 orang atau 100%.
- 3.2.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.285.000,- atau 86.82%, dengan output dari rencana Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang, terealisasi 5 orang atau 100%.
- 3.2.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, dari rencana anggaran sebesar Rp.

161.035.050,- terealisasi sebesar Rp. 160.505.390,- atau 99.67%, dengan output dari rencana Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 10 orang, terealisasi 10 orang atau 100%.

- 3.2.7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.445.000,- atau 97.64%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 5 Orang, teralisasi 5 Orang atau 100%
- 3.2.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.395.000,- atau 94.26%, dengan output rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 5 Orang, terealisasi 5 Orang atau 100%.
- 3.2.9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.425.000,- atau 96.28%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 10 orang, terealisasi 10 orang atau 100%.
- 3.2.10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.480.000,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 35 orang, terealisasi 35 orang atau 100%.

- 3.2.11. Pemberian Layanan Rujukan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 12.435.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.140.000,- atau 97.63%, dengan output dari rencana Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 10 orang, terealisasi 10 orang atau 100%.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 4.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dari rencana anggaran sebesar Rp. 64.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 55.725.000,-.atau 86.93%, dengan output dari rencana Jumlah Anak-anak terlantar yang dipelihara sebanyak 60 orang, terealisasi 60 orang atau 100% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- 4.1.1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.695.000,- atau 99.95%, dengan output dari rencana Jumlah Anak Terlantar yang di jangkau Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 40 orang, terealisasi 40 orang atau 100%.
- 4.1.2. Rujukan Anak-Anak Terlantar, dari rencana anggaran sebesar Rp. 44.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.370.000,- atau 81.36%, dengan output dari rencana Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 10, terealisasi 10 orang atau 100%.
- 4.1.3. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.660.000,- atau 99.59%, dengan output dari rencana Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 10 orang, terealisasi 10 orang atau 100%.
- 4.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.328.928.550,- terealisasi sebesar Rp. 2.292.417.186 atau 98.43%, dengan output dari rencana Jumlah Data

Fakir Miskin di Kabupaten Bogor yang dikelola sebanyak 1.835 orang terealisasi sebanyak 1.835 orang atau 100% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

4.2.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.089.597.350,- terealisasi sebesar Rp. 1.081.084.050,- atau 99.22% dengan output dari rencana Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata sebanyak 1.500 orang, terealisasi 1.500 orang atau 100%.

4.2.2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.237.851.200,- terealisasi sebesar Rp. 1.211.333.136,- atau 97.86% dengan output dari rencana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 330 orang, terealisasi 330 atau 100%.

4.2.3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%, dengan output dari rencana Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 5 Orang, terealisasi 5 Orang atau 100%.

5. Program Penanganan Bencana terdiri dari 2 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.687.362.875,- terealisasi sebesar Rp. 2.635.720.130,- atau 98.08% dengan output dari rencana Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan berupa Bantuan Kedaruratan dan Kebutuhan Dasar sebanyak 4.675 orang terealisasi sebanyak 4.675 orang atau 100%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

5.1.1. Penyediaan Makanan, dari rencana anggaran sebesar Rp.

- 1.710.437.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.682.961.380,- atau 98.39%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 4.000 Orang, terealisasi 4.000 Orang atau 100%.
- 5.1.2. Penyediaan Sandang, dari rencana anggaran sebesar Rp. 924.959.375,- terealisasi sebesar Rp. 900.792.750,- atau 97.39%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 500 Orang, terealisasi 500 Orang atau 100%.
- 5.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi Rp. 12.000.000,- atau 100% dengan output dari rencana Jumlah tempat penampungan yang tersedia untuk pengungsi sebanyak 5 Unit, terealisasi 5 Unit atau 100%.
- 5.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100% dengan output dari rencana Kelompok rentan yang diberi penanganan khusus sebanyak 10 orang, terealisasi 10 orang atau 100%.
- 5.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial, dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.966.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.966.000,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 160 orang, terealisasi 160 orang atau 100%.
- 5.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 848.090.100,- terealisasi sebesar Rp. 834.298.779,- atau 98.37%, dengan output dari rencana Terselenggaranya kesiapsiagaan masyarakat dan TAGANA terhadap penanganan

bencana sebanyak 100 Orang/Kp, terealisasi 100 Orang/Kp atau 100%.

5.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.480.000,- atau 100% dengan output dari rencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 8 Kampung, terealisasi 8 Kampung atau 100%.

5.2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, dari rencana anggaran sebesar Rp. 846.610.100,- terealisasi sebesar Rp. 832.818.779,- atau 98.37%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 120 orang, 120 Orang atau 100%.

6. Program Taman Makam Pahlawan terdiri dari 1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

6.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.467.690.947,- terealisasi sebesar Rp. 1.339.568.409,- atau 91.27% dengan output dari rencana Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan sebanyak 6 Makam terealisasi 6 Makam atau 100 % dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

6.1.1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 160.148.852,- terealisasi sebesar Rp. 59.699.515,- atau 37.28%, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

6.1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 112.115.720,- terealisasi sebesar Rp. 107.520.359,- atau 95.90%, dengan output dari rencana Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota sebanyak 3 Makam, terealisasi 3 Makam atau 100%.

6.1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.195.426.375,- terealisasi sebesar Rp. 1.172.348.535,- atau 98.07% dengan output dari rencana Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebanyak 6 Laporan, terealisasi 6 Laporan atau 100%.

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 6 Kegiatan, 35 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

7.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 821.785.580,- terealisasi sebesar Rp. 817.940.096,- atau 99.53%, dengan output dari rencana Tersedianya dokumen kinerja perangkat daerah sebanyak 25 dokumen terealisasi sebanyak 25 dokumen atau 100% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

7.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp 102.544.706,- terealisasi sebesar Rp. 102.076.046,- atau 99.54%, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 4 dokumen, terealisasi 4 dokumen atau 100%.

7.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 13.410.550,- terealisasi sebesar Rp. 13.313.900,- atau 99.28% dengan output dari rencana Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau 100%.

- 7.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 26.599.550,- terealisasi sebesar Rp. 26.449.550,- atau 99.44% dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- 7.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 21.934.475,- terealisasi sebesar Rp. 21.934.475,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen atau 100%.
- 7.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.165.925,- terealisasi sebesar Rp. 10.165.925,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen atau 100%.
- 7.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 12.542.775,- terealisasi sebesar Rp. 12.542.775,- atau 100% dengan output dari rencana Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 10 laporan, terealisasi 10 laporan atau 100%.
- 7.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 601.600.050,- terealisasi sebesar Rp. 599.593.400,- atau 99.67%, dengan output dari rencana Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat sebanyak 4 Laporan, terealisasi 4 Laporan atau 100%.

- 7.1.8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 32.987.549.- terealisasi sebesar Rp. 31.864.025,- atau 96.59% dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau 100%
- 7.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.868.176.737,- terealisasi sebesar Rp. 8.818.883.849,- atau 99.44%, dengan output dari rencana Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebanyak 46 Orang/Bulan, terealisasi sebanyak 46 Orang/bulan atau 100%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
- 7.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.534.162.962,- terealisasi sebesar Rp. 8.485.540.573,- atau 99.43%, dengan output dari rencana Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 46 orang, terealisasi 46 orang atau 100%.
- 7.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 146.806.450,- terealisasi sebesar Rp. 146.605.951,- atau 99.86%, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 Dokumen, terealisasi 12 Dokumen atau 100%.
- 7.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 51.034.050,- terealisasi sebesar Rp. 51.034.050,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebanyak 12 dokumen, terealisasi 12 dokumen atau 100%.
- 7.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 23.845.200,- terealisasi sebesar Rp. 23.845.200,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan

- Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 20 Laporan, terealisasi 20 Laporan atau 100%.
- 7.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 89.478.550,- terealisasi sebesar Rp. 89.948.550,- atau 99.48%, dengan output dari rencana Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran sebanyak 18 Laporan, terealisasi 18 Laporan atau 100%.
- 7.2.6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 22.379.525,- terealisasi sebesar Rp. 22.379.525,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 10 Laporan, terealisasi 10 laporan atau 100%.
- 7.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.111.564.875,- terealisasi sebesar Rp. 2.983.833.134,- atau 95.89%, dengan output dari rencana Jumlah Layanan Administrasi Umum sebanyak 11 Paket, terealisasi sebanyak 11 Paket atau 100%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
- 7.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 19.505.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.095.000,- atau 87.64%, dengan output dari rencana Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 1 Paket, terealisasi 1 Paket atau 100%.
- 7.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.820.478.750,- terealisasi

- sebesar Rp. 1.774.688.164,- atau 97.48%, dengan output dari rencana Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 Paket, terealisasi 2 Paket atau 100%.
- 7.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.492.950,- terealisasi sebesar Rp. 15.787.001,- atau 32.56%, dengan output dari rencana Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan sebanyak 2 Paket, terealisasi 2 Paket atau 100%.
- 7.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 77.248.500,- terealisasi sebesar Rp. 74.626.951,- atau 96.61%, dengan output dari rencana Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket, terealisasi 1 Paket atau 100%.
- 7.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 134.779.900,- terealisasi sebesar Rp. 110.529.128,- atau 82.01%, dengan output dari rencana Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 Paket, terealisasi 1 Paket atau 100%.
- 7.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 151.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 151.000.00,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen atau 100%.
- 7.3.7. Penyediaan Bahan/Material, dari rencana anggaran sebesar Rp. 254.044.775,- terealisasi sebesar Rp. 236.305.500,- atau 93.02%, dengan output dari rencana Jumlah Bahan/ Material yang disediakan sebanyak 1 Paket, terealisasi 1 Paket atau 100%.
- 7.3.8. Fasilitas Kunjungan Tamu, dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.456.500,- atau 93.42%, dengan output dari rencana Jumlah Laporan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 1 Laporan, terealisasi 1 Laporan atau 100%.
- 7.3.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 559.865.000,- terealisasi sebesar Rp. 559.445.090,- atau 99.92%, dengan output dari rencana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 324 Laporan, terealisasi 324 Laporan atau 100%.
- 7.3.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 18.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.900.000,- atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen atau 100%.
- 7.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.072.561.500,- terealisasi sebesar Rp. 221.171.005,-.atau 20.62%, dengan output dari rencana Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya sebanyak 1 unit, terealisasi sebanyak 1 Unit atau 100%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- 7.4.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.072.561.500,- terealisasi sebesar Rp. 221.171.005,-.atau 20.62%, dengan output dari rencana Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan sebanyak 1 unit, terealisasi 1 unit atau 100%.
- 7.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.349.440.695,- terealisasi sebesar Rp. 5.195471..560,- atau 97.12%, dengan output dari rencana Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sebanyak 4 jenis, terealisasi sebanyak 4 jenis atau 100%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
- 7.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.353.900,- terealisasi sebesar Rp. 6.353.900,-

atau 100%, dengan output dari rencana Jumlah dan jenis Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 Laporan, terealisasi 1 Laporan atau 100%.

7.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 525.180.000,- terealisasi sebesar Rp. 442.882.441,- atau 84.33%, dengan output dari rencana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan atau 100%.

7.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.700.364.270,- terealisasi sebesar Rp. 3.654.486.997,- atau 98.76%, dengan output dari rencana Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 2 laporan, terealisasi 2 laporan atau 100%.

7.5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT BKS), dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.117.542.525,- terealisasi sebesar Rp. 1.091.748.222,- atau 97.69% dengan output dari rencana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 100 laporan, terealisasi 100 laporan atau 100%.

7.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.880.822.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.872.276.067,- atau 64.99% dengan output dari rencana Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebanyak 15 Pemeliharaan, terealisasi sebanyak 15 Pemeliharaan atau 100% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

7.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 114.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.740.000,- atau 45.39%, dengan output dari rencana Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya sebanyak 8 unit, terealisasi 8 unit atau 100%.

- 7.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 858.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 808.506.100,- atau 94.19% dengan output dari rencana Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 27 unit, terealisasi 27 unit atau 100%.
- 7.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 141.270.000,- terealisasi sebesar Rp. 132.850.000,- atau 94.04%, dengan output dari rencana Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 8 unit, terealisasi 8 unit atau 100%.
- 7.6.4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 100.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 77.995.000,- atau 77.96%, dengan output dari rencana Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara sebanyak 8 Unit, terealisasi 8 Unit atau 100%.
- 7.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.150.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 495.895.067,- atau 43.10%, dengan output dari rencana Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 4 unit, terealisasi 4 unit atau 100%.
- 7.6.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 210.102.000,- terealisasi sebesar Rp. 00,- atau 0%, dengan output dari rencana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit, terealisasi 1 unit atau 100%.
- 7.6.7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 306.400.000,- terealisasi Rp. 305.289.900,- atau 99.64%, dengan output Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit, terealisasi 1 Unit atau 100%.

## BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah dicapai, yaitu dari 6 (enam) indikator kinerja telah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja dinas sosial antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial.

Namun demikian, untuk tahun 2025, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance clean government*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf dinas sosial;
2. Menetapkan target kinerja untuk setiap pegawai;
3. Kualitas dan kuantitas SDM pekerja sosial yang bisa dipertanggungjawabkan;
4. Sarana dan prasarana dalam penanganan sosial agar ditambah; dan
5. Agar diberikan *reward* untuk bidang yang capaian kerjanya tertinggi.

Kepala Dinas Sosial



Farid Ma'rup, S.H.,M.Hum.  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19761231 2002121014